

# RESPON PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI KEBERADAAN ISIS DI INDONESIA

Nur azizah, Data Yaumis Shofa, Depict Pristine Adi  
IAIN Jember  
*Azizahhabibi04@gmail.com*

## Abstract

The purpose of this research article is to describe the response of the Indonesian government in responding to the existence of Iraq and Syria or ISIS which has an ideology that is contrary to the ideology of the Indonesian people. The method used in this research is the library method by presenting data descriptively and analyzed qualitatively by examining library materials such as journal, books, articles and news on the internet relating to the object under study. The result of the study showed that the Indonesian government was very responsive in responding to the ISIS invitation in Indonesia, various efforts have been made by the Indonesian government in eradicating ISIS in Indonesia. Among others, by issuing a circular addressed to the regent, governors, mayors in all regions preventing Indonesian citizens from going to Syria and Iraq not to repatriate former ISIS citizens.

**Keyword :** Response, Government, ISIS, Respond

## Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi keberadaan Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel, dan berita di internet

yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat responsif dalam menyikapi keberadaan ISIS di Indonesia, bebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas keberadaan ISIS di Indonesia. Diantaranya dengan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada bupati, gubernur, wali kota diseluruh daerah, mencegah WNI untuk pergi ke Suriah dan Irak, dan tidak memulagkan WNI eks ISIS.

**Kata Kunci :** Respon, Pemerintah, ISIS, Menyikapi.

Article History: *Reccived 20 February 2020, Revised: 15 March 2020, Accepted: 29 April 2020, Available online 01 June 2020*

## **Pendahuluan**

Sejak dideklarasikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi pada 9 April 2013 di Suriah ISIS menjadi kelompok jihad utama yang memerangi Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. Kemudian tanggal 9-11 Juni 2014 ISIS menguasai Mosul yaitu kota terbesar kedua di Irak kemudian menyusul Tikrit. Hal ini menjadikan ISIS sebagai ancaman di kawasan Timur Tengah. *Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)* merupakan organisasi merupakan sebuah organisasi jihad yang memiliki tujuan untuk membangun negara islam. Mantan kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa ISIS merupakan gabungan dari kelompok utama, yaitu kelompok *Tauhid wal jihad* yang didirikan oleh Abu Muhammad Maghdisi dan *Takfiri* yang diperkenalkan oleh Abu Mussaf Jarkawi. ISIS menggunakan doktrin Takfiri dengan konsep Tauhid, artinya bagi orang yang tidak menggunakan konsep tersebut maka diperbolehkan untuk dibunuh dan dihancurkan (Dehora Sanur L, 2016:32). Doktrin inilah yang menyebabkan ISIS menjadi organisasi yang ditentang oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, karena doktrin yang mereka pegang tidak mencerminkan sifat perikemanusiaan.

Dalam mewujudkan tujuannya ISIS banyak menggunakan kekerasan yang brutal dan merebut kekuasaan pemerintah, dibuktikan dengan beredarnya video di internet yang berjudul “*A Message to America*”. Video tersebut berisikan adegan eksekusi seorang wartawan Amerika yang bernama James Foley, dalam selang waktu 2 minggu beredar kembali video yang berisi adegan eksekusi seorang wartawan Amerika yang bernama Steve Scotlof, maka dapat dilihat bahwa kehadiran organisasi ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan negara, dampak buruk tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban konflik yang terpaksa harus meninggalkan negaranya sendiri dan harus mengungsi ke negara lain untuk mencari perlindungan.

Tidak hanya menjadi ancaman di Timur Tengah, ISIS juga menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di dunia karena ideologinya yang terkenal ekstrim dan dapat merusak keutuhan suatu negara. Dengan melihat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh ISIS masyarakat internasional mulai memberikan perhatian dan respon penolakan dan perlawanan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh ISIS dalam upayanya untuk membentuk negara islam di dunia. Melihat kekerasan ISIS serta kecepataannya dalam menaklukkan wilayah, Prancis menunjukkan penolakannya terhadap ISIS dengan ikut bergabung bersama Amerika Serikat dalam serangan udara di Irak. Begitu juga dengan Belanda, aksi penolakan terhadap ISIS dilakukan oleh Belanda dengan meluncurkan bom pertamanya pada tanggal 2 Oktober 2014, selain itu Belanda juga menyalurkan bantuan untuk menyerang ISIS dengan menyebar pesawat tempur serta staf dan pelatih untuk melatih prajurit Irak (Kurnia, 2016: 213).

Walaupun masyarakat internasional menunjukkan perlawanan yang kuat ISIS masih saja terlihat begitu kuat. Menganalisis hal ini, kepala sekertariat pertahanan Amerika Serikat, Chuck Hagel pernah mengatakan bahwa ISIS bukan hanya kelompok teroris biasa. Semua gerakan ISIS dilandaskan oleh ideologi yang mereka yakini. Memiliki taktik

dan setragi yang canggih ditambah lagi ISIS merupakan sebuah kelompok yang memiliki pasukan yang besar. Fakta inilah yang membuat ISIS pantang menyerah dan melakukan perang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kehilangan nyawa dalam peperangan bukan merupakan akhir dari semua namun sebuah pengorbanan yang harus dilakukan.

Penyebaran ideologi ISIS tidak hanya di Timur Tengah saja melainkan sampai ke Asia, terlebih lagi Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Malaysia. Dalam upaya menyebarkan ideologinya, kelompok ISIS banyak melakukan tindak kekerasan hingga pembunuhan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Kelompok ISIS tidak segan untuk menyingkirkan semua pihak yang menghalangi upaya pendirian negara Islam versi mereka. Hal tersebut disebabkan karena dalam pandangan kelompok ISIS, jika pihak tersebut tidak termasuk sebagai pendukung ISIS maka secara otomatis pihak tersebut akan menjadi lawan atau musuh mereka (Dina Oktarina dan Adhitama Nanda Wardhana, 2018:187). Organisasi tersebut ternyata sudah hadir sejak lama dan telah mendapat banyak dukungan dari sebagian masyarakat di Asia Tenggara. Menurut Liow dalam tulisannya *Foreign* yang berisi tentang analisis faktor-faktor mengapa ideologi ISIS memperoleh dukungan simpati masyarakat Muslim Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia ( Joseph Chinyong Liow, 2014). Faktor yang pertama adalah adanya pandangan keagamaan dan keimanan yang sama dengan kelompok ISIS. Sebagian umat muslim melihat adanya hubungan paralel antara misi ISIS dengan “ramalan” dalam islam yang menyatakan bahwa akan berdiri sebuah negara islam *Khalifah ala Minhaj Nubuwwah* seiring dengan runtuhnya pemerintah otoriter di Jazirah Arab. Kedua, ISIS menyerukan sektarianisme melawan Syiah dimana negara-negara di Asia Tenggara mendukung politik sektarianisme tersebut. Ketiga, adanya rasa simpati dan perasaan senasib sebagai umat islam terhadap masyarakat Suriah kemudian mendorong masyarakat

muslim Asia Tenggara melakukan jihad atas misi kemanusiaan.

Kehadiran faham untuk mendirikan negara islam di Indonesia bukan merupakan hal baru, namun sudah ada sejak tahun 1949 setelah Indonesia merdeka. Diawali oleh seorang aktivis politik islam bernama S.M Krtosuwiryo yang memproklamirkan negara islam independen di Jawa Barat. Menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris, fahm seperti ISIS merupakan faham yang sudah lama berkembang di Indonesia, hanya saja ISIS merupakan sebutan yang baru namun dalam segi ideologi cenderung sama. Kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang cenderung sama menyatakan dukungannya terhadap ISIS dalam membentuk negara islam. Contoh dukungan tersebut datang dari Jemaah Islamiyah, Negara Islam Indonesia, dan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), anggota dari jemaah-jemaah tersebut direkrut oleh ISIS dan secara langsung bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Faham-faham radikal yang berada di Indonesia harus diatasi secara serius oleh pemerintah, apabila pemerintah kurang serius dan sigap dalam menangani faham-faham radikal tersebut maka akan mengancam kedaulatan NKRI. Negara Indonesia yang berideologi Pancasila dan memiliki banyak budaya, suku, ras, agama sangat tidak cocok apabila ditempati oleh organisasi-organisasi radikal yang anti Pancasila, karena pancasila dirumuskan oleh orang-orang yang berbeda latar belakang untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan sejahtera.

Indonesia negara dengan banyak beragam perbedaan mulai dari bahasa, suku, budaya, agama, dan lain-lain tengah harus menghadapi ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok pemecah belah yang memiliki ideologi yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus terorisme di Indonesia ini, upaya tersebut yaitu dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,

memperketat penjagaan di tempat-tempat ibadah yang biasanya dilaksanakan ketika menjelang hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain. Akan tetapi upaya tersebut belum maksimal dikarenakan anggota-anggota dari organisasi tersebut sangat pandai dalam menyamar dan mengatur setrategi sehingga mereka berhasil dalam melakukan aksi-aksinya.

Walaupun mereka berasal dari organisasi yang kebanyakan orang menganggap organisasi islam, tetapi apa yang mereka lakukan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai islam. Agama islam merupakan agama yang cinta kedamaian, tidak menganjurkan untuk melakukan kekerasan terhadap siapapun, apalagi kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tindakan tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT. Dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan organisasi tersebut menyebabkan banyak orang memiliki persepsi yang negatif terhadap islam khususnya dari orang-orang non muslim, sampai-sampai terdapat istilah Islam Phobia yang muncul sejak terjadinya serangan 11 september 2001 di New York City, serangan tersebut merupakan serangan bunuh diri yang berawal dari pembajakan pesawat oleh kelompok militan islam Al-qaeda. Istilah tersebut merupakan bentuk diskriminasi bagi umat islam yang tidak bersalah dan tidak ikut andil dalam peristiwa tersebut, tetapi menjadi korban atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok beraliran radikal tersebut.

Akibat kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok ISIS tersebut , mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan sebagai bentuk respon terhadap keberadaan ISIS di Indonesia. Untuk menganalisis kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan keberadaan ISIS peneliti menggunakan pendekatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang

dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat (Ilham Ramadhan & Hade Afriansyah, 2019: 2). Sebelum seorang pemimpin mengambil keputusan, hendaknya mengacu pada beberapa prinsip, diantaranya: *Pertama*, Autonom, hal ini berkaitan apakah keputusan yang diambil dapat merugikan orang lain. *Kedua*, Non-malfeasance, yaitu apakah keputusan yang diambil dapat menciderai pihak lain. *Ketiga*, Beneficence, keputusan harus dapat menjadi solusi bagi masalah dan merupakan solusi terbaik yang bisa diambil. *Keempat*, Justice, Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan faktor keadilan dan termasuk implementasinya.

Dari penjelasan di atas penelitian ini akan membahas tentang sejarah perkembangan ISIS di Indonesia, perkembangan ISIS di Indonesia mendapatkan respon dan dukungan yang positif dari kelompok-kelompok radikal yang sudah ada terlebih dahulu sebelum kedatangan ISIS di Indonesia. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut sudah ada sejak setelah kemerdekaan Indonesia, dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok radikal tersebut membuat ISIS semakin berkembang dan mendapat banyak pengikut, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerintah Indonesia. Dalam artikel ini juga dibahas tentang respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi keberadaan ISIS di Indonesia. Perkembangan ISIS yang menunjukkan kemajuan mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah untuk mengatasi keberadaan organisasi tersebut, oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi keberadaan ISIS di Indonesia agar Indonesia terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan ideologi yang dapat memecah belah keutuhan NKRI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk memperoleh data, dengan jalan mengadakan penelitian

kepuustakaan , seperti melalui membaca, menulis, mengutip materi yang berhubungan dengan dengan masalah dalam penulisan ini Muhadjir (dalam I.W Arya Adyana, 2020: 22). Penelitian dilakukan dalam waktu satu bulan yang dimulai dari bulan April sampai Mei.

### **Sejarah Perkembangan ISIS di Indonesia**

*Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) adalah organisasi jihad yang berasal dari Iraq dan Suriah, kelahiran ISIS tidak lepas dari konflik (perang saudara) di Irak dan Suriah. ISIS lahir dari rahim konflik politik dan carut marut perebutan kekuasaan di Timur Tengah yang sering dikenal dengan istilah *Arab Sprig* (Abdul Jamil Wahab, 2019:104). Pada awalnya ISIS didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi, pada tahun 2000 al-Zarqawi bertemu dengan Osama pimpinan al-Qaeda untuk meminta bantuan mendukung jaringannya yaitu Jamaat al-Tawhid wal Jihad (JTW) untuk menggulingkan pemerintah Yordania. Setelah pertemuan tersebut al-Zarqawi kemudian mendirikan Tandzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidyan yang disebut juga Al-Qaeda Iraq (AQI) terget dari didirikannya jaringan tersebut adalah untuk menguasai Irak. Kemudian pada tahun 2006 jaringan tersebut membentuk MSM (Mujahidin Shura Council atau Majelis Shura Mujahidin) yang kemudian menjadi Islamic State of Iraq (ISI), jaringan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya ISIS.

Kemudia ditahun yang sama al-Zarqawi tewas akibat ledakan bom yang dijatuhkan oleh F-16 milik Amerika Serikat. Setelah tewasnya al-Zarqawi kepemimpinan jaringan tersebut dipegang oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, jaringan tersebut semakin kuat semenjak dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi, pada tahun 2011 al-Baghdadi berhasil menguasai beberapa daerah yang ada di Suriah, karena keberhasilannya inilah maka pada tahun 2013 al-Baghdadi mengganti nama Islamic State of Irak (ISIS) menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Setelah menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah, Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS

mendeklarasikan berdirinya negara khilafah di wilayah Irak dan Suriah pada tahun 2014. Pada tahun inilah ISIS mengalami kejayaan.

ISIS memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam. Tujuan tersebut didasari oleh keinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam dimasa lalu melalui pendirian negara Islam. ISIS dikenal memiliki ideologi yang ekstrim, dengan berpegang pada ideologi ekstrim gerakan organisasi tersebut telah melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak sefaham dengannya yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban dan menimbulkan banyak kekacauan. Selain melakukan kekerasan terhadap orang dewasa, ISIS juga melakukan kekerasan terhadap anak-anak, hal ini telah melanggar Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia (Hadijah Wahid, 2018: 11).

Perkembangan ISIS tidak lepas dari situasi politik regional, di mana negara-negara Timur Tengah sedang mengalami transisi politik, demokrasi, dan pergolakan revolusi yang tidak selesai. Pada situasi demikian ini ISIS mengambil opportunity/peluang dan kesempatan politik. Keberadaan ISIS berada dalam “jebakan demokrasi”. ISIS menyelip dalam suasana transisi demokrasi yang tidak mulus, terutama di Irak dan Suriah. ISIS menjadikan kedua negara tersebut sebagai laboratorium untuk mengukuhkan ideologi kekerasan yang mengatasnamakan “khilafah Islamiyah”. Sumber daya yang melimpah memungkinkan ISIS mengembangkan jaringan ke berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. ISIS menyakini bahwa ada sebagian umat Islam yang menyimpan keinginan dan mimpi untuk mendirikan “negara Islam”, sehingga tidak akan kesulitan bagi gerakan ini untuk mendapatkan pejuang dengan jalan membangunkan kembali sel-sel radikalisme atau ekstrimisme dunia Islam (Joko Tri Haryanto, 2015:24). Dalam

mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara islam, ISIS menyebarkan propaganda untuk mengajak umat muslim di dunia agar mendukung aksi-aksinya untuk mendirikan sebuah negara islam. Penyebaran propaganda dilakukan melalui internet, karena dengan internet faham yang mereka ajarkan dapat dengan cepat tersebar luas keseluruh penjuru dunia.

Penyebaran faham ISIS melalui internet akhirnya sampai ke negara Indonesia. Awal mula keberadaan ISIS di Indonesia diketahui sejak adanya deklarasi di Gedung Syahida Inn milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 Juli 2014. Dalam deklarasi tersebut, mereka menamakan kelompoknya dengan nama “Penegak Syariat Islam” yang menyatakan dukungan kepada ISIS serta menggunakan bendera ISIS dalam deklarasinya. Banyak pihak yang mengutuk peristiwa deklarasi tersebut, dan pada kenyataannya saat itu pihak UIN sendiri tidak menyadari bahwa penyewaan gedung tersebut ditujukan untuk medeklarasikan ISIS di Indonesia (Muhammad Haidar Assad,2014:172). Setelah deklarasi tersebut beberapa kelompok pendukung ISIS mulai terdeteksi dan mulai berani menunjukkan eksistensinya. Mantan deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal Agus Surya Bakti mengatakan bahwa sebenarnya faham ISIS telah masuk ke Indonesia sebelum gerakan tersebut dideklarasikan di Timur Tengah (Kompasiana.com), faham tersebut masuk ke Indonesia banyak melalui jaringan internet, masyarakat Indonesia dengan mudah mengakses informasi seperti berita, artikel hingga vidio, bahkan ada yang berkomunikasi dengan anggota ISIS di Timur Tengah. Pada tahun 2013 diduga ada 56 orang Indonesia dari berbagai macam organisasi islam dan kelompok pedagang berangkat ke Irak untuk bergabung dengan ISIS . Mereka bergabung saat pergi ke Arab Saudi untuk ibadah haji atau umrah. Dari jumlah tersebut sekitar 16 orang telah kembali ke Tanah Air dan melanjutkan proses perekrutan di daerah masing-masing.

Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seseorang mau untuk bergabung dengan gerakan terorisme tersebut.

Motivasi tersebut datang dari kondisi yang ada di negara yang ditinggalinya seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan dan rasa kecewa terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai, yang dapat mendorong seorang individu untuk bergabung ke dalam gerakan ISIS tersebut. (Novie Lucky dan Feriana Khusindarti, 2017: 228). Tidak hanya faktor dari kondisi suatu negara yang dapat membuat seseorang bergabung dalam gerakan terorisme, seseorang yang belum faham atau masih dangkal dalam memahami agama atau kitab sucinya sendiri akan salah dalam mengartikan dan melakukan tindakan dan dapat dengan mudah terpengaruh faham-faham lain yang bersifat negatif di luar apa yang dibenarkan oleh agamanya. Dan pada akhirnya akan membuat orang tersebut bergabung dengan ISIS, orang tersebut beranggapan dengan bergabung menjadi anggota ISIS akan mengubah kondisi mereka seperti yang mereka inginkan.

Kehadiran faham radikal yang ingin mendirikan negara islam sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, jauh sebelum kemunculan ISIS di Indonesia telah terbentuk beberapa organisasi-organisasi islam yang memiliki ideologi bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam menjadi sasaran yang tepat bagi berkembangnya aliran-aliran dengan ideologi yang bertentangan dengan negara Indonesia. Kemunculan aliran ekstrimis di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 yang diproklamkan oleh seorang aktivis politik islam S.M. Kartosuwiryo. Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan Darul Islam yang melakukan kontrol di beberapa provinsi Indonesia. Awalnya Darul Islam merupakan organisasi politik yang memiliki sayap militer dan ikut berjuang bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, sekarang Tentara Nasional Indonesia/TNI) melawan penjajah Belanda (Lukman Hakim, 2004:48). Namun kemudian, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh pada 1949, DI masih tetap mempertahankan tentara dan perjuangannya untuk mendirikan NII. Menurut

Wahid, DI berusaha mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam versi mereka atau bahkan menghilangkan NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah. Gerakan Darul Islam inilah yang mendorong kemunculan gerakan-gerakan islam lainnya di Indonesia, seperti Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1970 dan Jemaah Islamiyah pada tahun 1990.

Di Indonesia tidak hanya terdapat dua gerakan islam tetapi juga banyak gerakan-gerakan islam lainnya seperti Hisbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Salafi, Front Pembela Islam (FPI) dan lainnya. Gerakan Islam tersebut memberikan pengaruh yang signifikan di Indonesia mengenai Islam dan gerakannya. Tidak semuanya gerakan-gerakan tersebut beraliran menyimpang tetapi ada juga yang beraliran sesuai dengan ajaran islam yang sesungguhnya dan taat kepada NKRI. Kelompok geraka islam di Indonesia semakin menunjukkan perkembangannya pada masa reformasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai-partai islam yang berdiri. Situasi tersebut juga didukung oleh maraknya ormas-ormas islam seiring dengan kebebasan yang diberikaan pada masa reformasi tersebut dan mengakibatkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tersebut. Situasi ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dihadapi oleh pemerintah Indonesia, terlebih lagi meningkatnya masyarakat yang mendukung gerakan-gerakan tersebut menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI yang berideologi Pancasila.

Meskipun kelompok radikal Islam yang berkembang saat ini memiliki banyak varian baik itu pada segi keorganisasian, model gerakan, maupun latar belakang kelahirannya, tetapi mereka memegang doktrin yang hampir sama, antara lain: *pertama*, membentuk sebuah kekuasaan alias khilafah Islam. Sebab, hanya melalui sarana itulah, kekuasaan politik, syariat Islam dan semua kebijakan yang betul-betul islami bisa diberlakukan. *Kedua*, memutus hubungan dengan masyarakat

kontemporer. Dalam pikiran mereka, masyarakat saat ini dilihat sebagai “tidak suci”, telah menyeleweng dari ajaran Islam. Mereka menyebutnya sebagai “jahiliah modern”. Konsep takfir (pengkafiran), termasuk bagi Muslim yang tidak setuju terhadap agenda islamis mereka, antara lain berkembang dari doktrin ini. *Ketiga*, menciptakan Teokrasi. Dalam pandangan mereka, sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, atau apa pun) yang tidak berasal dari Islam adalah kufur. Mereka menentang baik demokrasi (kekuasaan rakyat) maupun kekuasaan otoriter dengan dalih model kekuasaan tersebut tidak berasal dari Islam. Dalam Islam, hanya Allah yang berkuasa. Golongan islamis menggunakan slogan-slogan, “syariah adalah solusi” dan “al-Qur’an adalah konstitusi”(Zaki Mubarak, 2015:87).

ISIS menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis untuk menyebarluaskan ideologi radikalnya. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam, Indonesia menjadi tempat yang setrategis bagi kelompok negara islam (IS) untuk menyebarkan ideologinya, selain itu ISIS juga mengumpulkan tentara dalam upaya membangun negara Islamnya. Berbagai kelompok masyarakat di Indonesia baik dari anakanak, remaja, hingga orang dewasa, telah direkrut dan dilatih oleh kelompok ISIS untuk dijadikan tentara (Dina Oktarina & Adhiatma Nanda W, 2018:188). Upaya propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut tidak hanya mengandalkan aksi atau gerakan yang mereka lakukan di dunia nyata, propaganda-propaganda yang mereka lakukan juga memanfaatkan mdia sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Website* dan lain-lain. Meningkatnya jumlah pendukung kelompok tersebut juga dapat dilihat dari adanya beberapa masyarakat Indonesia yang pergi ke Suriah atau Irak untuk bergabung secara langsung dengan ISIS dan memberikan bantuan untuk membentuk negara Islam. Terlebih di Indonesia terdapat beberapa kelompok ekstrimis yang sudah ada sejak dahulu yang siap memberikan dukungan terhadap kelompok radikal dari luar tersebut. Dukungan tersebut datang dari

Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Islamiyah, JTWJ, dan MI, kelompok-kelompok tersebut merupakan pendukung dan pengikut yang aktif dalam gerakan ISIS, mereka memiliki anggota sangat banyak dan ingin melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Dukungan-dukungan tersebut semakin mempermudah ISIS untuk merekrut anggota untuk dijadikan pengikutnya.

Walaupun ISIS telah berkembang di Indonesia dan mendapat banyak dukungan, tetapi perkembangan ISIS di Indonesia tidak senampak di negara asalnya yaitu Irak dan Suriah, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Indonesia berideologi Pancasila yang menghargai perbedaan, mencintai perdamaian, yang tentunya sangat berbeda dengan ideologi yang dibawa oleh gerakan ISIS tersebut. Perekrutan anggota oleh gerakan ISIS dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ISIS adalah gerakan yang ditentang oleh pemerintah Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), perekrutan anggota ISIS dilakukan melalui orang terdekat dan keluarga, alasannya karena antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya pasti memiliki kepercayaan yang lebih kuat (NTV).

Sepanjang perjalanan perkembangannya ISIS telah menimbulkan kekacauan dan keresahan bagi masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh aksi-aksi mereka yang tidak bertanggung jawab. ISIS identik dengan aksi terorismenya dengan megebom tempat-tempat tertentu yang sudah menjadi target sarasannya. Telah banyak jejak-jejak terorisme yang telah dilakukan oleh gerakan ISIS di Indonesia, pasca reformasi 1998 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya bom yang meledak hampir bersamaan diberbagai tempat di Indonesia, hal tersebut terjadi pada malam natal tanggal 25 Desember 2000. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2001 kembali terjadi ledakan bom yang berjumlah 81, 29 diantaranya meledak di Jakarta. Polisi Indonesia telah mengidentifikasi bahwa dalang dari pengeboman tersebut

adalah Jamaah Islamiah (JI) (Herdi Sahrasad & Al Chaidar, 2016: 349).

Kasus-kasus pengeboman terus berlanjut di Indonesia, pada Agustus 2015 Densus 88 Mabes Polri menangkap tiga tersangka aksi pengeboman di kota Solo. Kapolda Irjen Pol Noer Ali mengatakan bahwa tiga tersangka tersebut akan melakukan aksi pengeboman di sejumlah lokasi, yaitu di tempat ibadah umat Nasrani dan Konghucu, serta kantor kepolisian. Dua tahun kemudian tepatnya pada hari Rabu 24 Mei 2017 ISIS bertanggung jawab atas teror bom bunuh diri di Kampung Melayu, dalam teror tersebut telah menewaskan lima orang termasuk dua terduga pelaku, Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Sukri, dan menimbulkan korban luka-luka sebanyak 12 orang (Liputan 6.com). Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ISIS, masih banyak aksi-aksi lainnya yang dilakukan oleh kelompok ISIS di seluruh tanah air.

Sampai pada saat ini tahun 2020 masih terdapat permasalahan berkaitan dengan ISIS. Terdapat ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dalam ISIS terkatung-katung di negara orang. Secara pribadi bapak presiden kita menolak rencana untuk memulangkan mereka, "Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih akan dibahas dalam rapat kabinet," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara personal juga sependapat dengan Jokowi (D katadata.co.id). Rencana pemulangan WNI eks ISIS ini pertama kali disebut oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Dia mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS ke Indonesia. Rencana tersebut menimbulkan polemik di Indonesia. Akan berat untuk memulangkan mantan anggota ISIS yang sebelumnya menyatakan kesetiaan terhadap ISIS, tidak semua mantan anggota ISIS tersebut telah lepas seutuhnya sebagai pengikut ISIS, dikhawatirkan jika

pemerintah menyetujui pemulangan mereka, mereka akan menyebarkan ideologi yang mereka bawa dan hal ini akan menjadi beban bagi pemerintah Indonesia. Disisi lain mereka mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia untuk pulang ke Tanah Air dan tinggal di Indonesia.

### **Respon Pemerintah Indonesia Terhadap ISIS**

Sebuah Negara dapat bertindak dan melakukan apapun demi menjaga kedaulatannya. Dalam konteks Perkembangan ISIS yang semakin menyebar luas ajaran ekstrimnya bukan hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Namun juga menjadi perhatian negara-negara internasional, pengaruh ISIS yang mengancam masyarakat bahkan keamanan ketahanan negara sangat dirasakan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia merupakan tempat yang paling tepat bagi ISIS untuk mengumpulkan tentara dalam membangun negara Islamnya (Dina Oktarina & Adhiatma Nanda Wardhana, 2018:188). Penyebaran ISIS yang awalnya dari media sosial baik itu *Facebook*, *Twitter*, *Website*, dan lain-lain telah mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang berasal dari organisasi-oragnisasi ekstrimis di Indonesia, hal ini disebabkan karena mereka memiliki tujuan dan ideologi yang sama, sehingga dukungan-dukkungan tersebut semakin memperkuat kelompok tersebut dalam menjalankan aksinya untuk membentuk negara islam. Banyaknya simpatisan ISIS di Indonesia membuat kondisi keamanan nasional Indonesia menjadi terancam. Bukan hanya karena aksi terornya yang sangat meresahkan masyarakat, namun juga karena ideologi yang mereka anut. Bagi Indonesia, pernyataan ISIS yang sangat ekstrem adalah menyamakan Pancasila dengan berhala (thought), dan kelompok ini menyatakan memerangi konsep pancasila (Muhammad Haidar Assad,2014:131).

ISIS yang memilikik ideologi bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia keberadaannya sangat mengancam keutuhan

NKRI, aksi yang dilakuka ISIS seperti kekerasan, pengeboman, dan lain-lain telah menimbulkan kekhawatiran dan ancaman bagi masyarakat Indonesia. Aksi-aksi tersebut menimbulkan respon dari pemerintah Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam terhadap keresahan yang dibuat oleh kelompok-kelompok ekstrimis tersebut. Sejak 4 Agustus 2014 pemerintah Indonesia di bawah pimpinan presiden Susio Bambang Yudhoyono telah menetapkan kebijakan melarang ISIS di Indonesia baik secara formal maupun informal. Saat itu pemerintah memandang bahwa ideologi ISIS sangat bertentangan dengan ideologi negara Indonesia (Frances Martel, 2014). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak para pemimpin agama untuk mengahadang ISIS dan radikalisme. Ia menganggap bahwa kekerasan dan pembantaian yang dilakuka oleh ISIS merupakan hal yang mengerikan. “Ini sungguh mengejutkan. Hal ini sudah diluar kendali”, kata SBY dalam wawancara dengan harian The Australian. SBY dengan tegas memberikan retorikanya agar masyarakat menolak dan menyadari bahwa ISIS bukanlah Islam yang sebenarnya ( Livia & Soenarto,2015:76-77). SBY juga Telah mengeluarkan mengeluarkan 7 instruksi terkait Penanggulangan ISIS di Indonesia, 7 instruksi tersebut adalah:

1. Kementerian dan lembaga terkait harus proaktif dalam pencegahan. Khususnya bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana yang diinstruksikan untuk menyeleksi ketat setiap perjalanan WNI ke Timur Tengah.
2. Berbagai Instansi yang berkaitan dengan WNI di Luar Negeri diminta untuk memantau nama-nama WNI yang ada di Suriah.
3. Aparat hukum dan masyarakat diminta untuk mengawasi gerak-gerik warga asing di Indonesia.
4. Instansi hukum khususnya Kementerian Hukum dan HAM diperintah utuk memperketat pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi terpidana kasus terorisme.

5. Pengawasan dari aparat hukum dan TNI pada wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi konflik maupun yang memiliki rekam jejak.
6. Menteri agama diminta mengkoordinasikan pendekatan *soft power* dalam mengelola ISIS dengan mengintensifkan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
7. Pemerintah harus menindak tegas pelaku terorisme yang dianggap merusak nilai pancasila (Debora Sanur L,2016:36).

Aparat keamanan memperkirakan, ada puluhan warga Indonesia yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS. SBY mengatakan, ia khawatir jika para relawan kembali ke Indonesia, mereka akan melakukan serangan teror baru. Maka dari itu Indonesia berusaha menangkal penyebaran radikalisme (Live TV). Langkah yang diambil SBY untuk meminimalkan penyebaran ideologi ekstrim tersebut yaitu dengan mengeluarkan surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Surat Edaran yang bernomor 450/3806/SJ per tanggal 7 Agustus 2014 itu ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh daerah dan juga ditembuskan kepada Kepala Bakesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan pencegahan WNI ke Irak atau Suriah, pemantauan yang ketat terhadap WNI yang diketahui berada di Suriah, mengetatkan pengelolaan terorisme di lembaga pemasyarakatan ( Najmudin, 2017:57 ) serta pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai rawan, dan juga melalui penegakan hukum.

Berlanjut pada pemerintahan selanjutnya yaitu pemerintahan presiden Joko Widodo, presiden Jokowi juga mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menangani kasus terorisme ini, kasus ini merupakan kasus yang harus diberantas demi keamanan negara Indonesia. presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia memiliki pendekatan keagamaan (*religion approach*) dan pendekatan budaya (*cultural approach*) dalam menyikapi ISIS. Indonesia menolak

ajakan masyarakat internasional untuk memerangi ISIS dengan cara kekerasan menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*). Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter Terrorism Executive Directorate (UNCTED). Lebih lanjut Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS) (Kemendagri, 2019).

Baru-baru ini terdapat polemik pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia, terdapat ratusan warga negara Indonesia yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah, Turki, yang ditolak oleh pemerintah untuk dipulangkan kembali ke tanah air. Keputusan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS tersebut diambil dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020 (CNBC Indonesia). Presiden Jokowi dengan tegas mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah tak memulangkan WNI eks ISIS sudah bulat, hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan 267 juta rakyat Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk menguatkan kebijakan penanganan ISIS, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan presiden Perpres No. 4 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian diubah menjadi Perpres No.12 tahun 2012. Setelah keputusan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS tersebut diambil, terjadilah polemik tentang status kewarganegaraan WNI eks ISIS tersebut, keputusan yang diambil pemerintah tersebut tidak serta merta menjadikan status kewarganegaraan WNI eks ISIS telah tercabut. Kehilangan status kewarganegaraan bagi WNI sejatinya sudah diatur dalam undang Nomor 12 tahun 2006 tentang

kewarganegaraan dalam pasal 23. Setidaknya dalam pasal 23 ini terdapat sembilan poin yang menyebabkan seorang WNI berusia 18 tahun ke atas kehilangan status kewarganegaraannya. Pencabutan kewarganegaraan merupakan hukuman yang bersifat fundamental mengakibatkan hilangnya semua hak-hak mendasar baik hak pasif maupun hak aktif dan hak-hak mendasar lain termasuk hak terhadap harta benda, hak membentuk keluarga dan keturunan, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan terhadap diskriminasi, hak atas identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional dan seperangkat hak-hak asasi lainnya (Kifly Arafat Samu,2018:77).

Dalam pasal 23 tersebut disebutkan bahwa seorang WNI akan kehilangan status kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri, tidak mau melepaskan kewarganegaraan negara lain, menghilangkan status kewarganegaraannya atas permohonan sendiri, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing dan mempunyai paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, dan yang terakhir yaitu seseorang kehilangan status WNI jika dia menetap atau tinggal di luar Indonesia selama lima tahun secara terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara dan tanpa alasan ah, tak memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI dalam rentang lima tahun tersebut.

Pemulangan WNI eks ISIS tersebut menimbulkan perdebatan publik dikalangan masyarakat, ada yang menyatakan setuju terhadap pemulangan WNI eks ISIS tersebut tetapi ada pula yang merasa tidak setuju. Pemulangan

WNI eks ISIS tersebut jelas menimbulkan perdebatan, apabila pemulangan WNI eks ISIS tersebut disetujui maka ditakutkan mereka akan membuat ulah lagi di Indonesia, ideologi ekstrim yang mereka pegang tidak serta merta hilang begitu saja, hal ini yang membuat beberapa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa pejabat pemerintahan tidak setuju terhadap pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Keputusan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS juga menimbulkan argumen tidak setuju dari sebagian masyarakat, hal ini dikarenakan alasan hak asasi, mereka masih punya hak untuk kembali ke negaranya dan menjadi warga negara Indonesia seperti dulu.

selain upaya atau respon pemerintah yang dilakukan dalam negeri, juga melakukan kerjasama dengan negara lain yaitu:

1. Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerjasama melawan kelompok ISIS. Kesepakatan ini dicapai di tengah kekhawatiran bahwa para militan ISIS yang kembali dari Timur Tengah bisa melancarkan serangan Asia Tenggara. Kesepakatan ini disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Singapura.
2. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungan ke Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Juli 2015 sepakat bekerja sama untuk melawan ISIS, kedua negara akan melakukan kerja sama informasi dan kerjasama intelijen guna memantau penyebaran ISIS di kedua negara. Menurut Presiden Joko Widodo Indonesia akan mengirimkan intelijen nya ke Turki untuk mengawasi WNI yang akan pergi ke Suriah Melalui Turki.
3. Dalam kunjungan Perdana Menteri David Cameron ke Indonesia pada tanggal 27 Juli 2015, kedua negara Inggris dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang terorisme. Kedua negara

bersepakat bahwa gerakan ekstremis paling berbahaya saat ini, sebagai musuh bersama yang membahayakan. Karena itu Inggris bekerjasama melindungi warganya di kedua negara masing-masing.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hal ini Kementerian Pertahanan kedua negara sepakat untuk melakukan pembicaraan bilateral tingkat Menteri Pertahanan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Rymizard Ryacudu pada tanggal 25-27 februari 2015 tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dalam menghadapi penyebaran ISIS di kedua negara. Bentuk kerjasama diantara kedua negara adalah pertukaran informasi di bidang intelijen untuk mengatasi ancaman terorisme, koordinasi perbatasan dan peningkatan kerjasama patroli laut di Selat Malaka (Bayu Tetuko & Sri Muryantini, 2016:9-11).

### **Kesimpulan**

ISIS merupakan organisasi jihad yang berasal dari Suriah dan Irak dan memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam, untuk mendapatkan dukungan ISIS menyebarkan ajarannya melalui media sosial, dengan media sosial maka penyebaran ajaran tersebut akan tersebar secara cepat. Penyebaran ajaran atau ideologi tersebut telah sampai di Indonesia dan telah mendapatkan dukungan positif dari beberapa organisasi ekstrimis yang ada di Indonesia dan mempunyai ideologi dan tujuan yang sama, yaitu mendirikan Khilafah Islamiyah atau negara Islam.

Dalam melakukan aksinya organisasi ini sering melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka, karena ideologi yang mereka anut adalah ideologi yang ekstrim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas organisasi ekstrimis tersebut, sebenarnya apa yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam menangani kelompok tersebut sudah maksimal akan tetapi upaya tersebut

tidak secara total dapat memberantas keberadaan kelompok tersebut, terlebih lagi kelompok-kelompok tersebut sudah mendapat banyak dukungan dari sebagian masyarakat Indonesia. Orang-orang yang menjadi pendukung kelompok tersebut kebanyakan mempunyai pemahaman agama yang dangkal sehingga mudah sekali untuk terpengaruh terhadap ajakan kelompok tersebut.

Pada hakikatnya untuk mendirikan negara islam pada masa sekarang ini merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan, akan sangat susah untuk membuat orang-orang diseluruh dunia ini setuju akan berdirinya sebuah negara islam, karena mereka sudah mempunyai keyakinan masing-masing yang sudah tertanam sejak kecil. Dengan membentuk negara islam artinya memaksakan kehendak kepada semua orang, apalagi dilakukan dengan cara kekerasan. Sungguh hal ini tidak dibenarkan dalam agama apapun.

### Daftar Rujukan

- Abdul Jamil, Wahab. 2019. *ISLAM RADIKAL DAN MODERAT Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Adnyana, I Wayan Arya. 2020. *Tutur Parakriya, Kontemplasi dan Rekonstruksi Moral Hindu*. Badung: NILACAKRA.
- Assad, Muhammad Haidar. 2014. *ISIS Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira.
- Arafat Samu, Kifly. Desember, 2018. "Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Inernasional". *Jurnal Lex Et Societatis* vol. 6. no. 10, 77.
- Ariesta Fahdiny, Kurnia. Desember, 2016. "Respon Masyarakat Internasional Terhadap ISIS: Aspek Politik dan Militer". *The Journal of Islamic Studies and International Relations* vol. 1. no. 2, 211-226.
- Hadijah, Wahid. Maret, 2018. "Tindak Pidana yang Dilakukan Para Remaja di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis dan Kriminologis)". *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* vol. 1. no. 1, 49-61.
- Hakim, Lukman. 2004. *Terorisme Indonesia*. Surakarta: FSIS.  
<http://www.breitbart.com/nationalsecurity/2014/08/06/indonesia-criminalizessupport-for-isis/> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2020).

- <https://www.cnbcindonesia.com> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2020).
- <http://www.foreignaffairs.com/articles/142004/joseph-chinyong-liow/isis-goes-to-asia> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2020).
- <https://katada.co.id/berita/2020/02/06/ditolak-pulang-sejarah-kebangkitan-hingga-kehancuran-isis> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2020).
- <https://kamutau.nusantaratv.com/amp/sejarah/isis-dan-perkembangannya-di-indonesia/2> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2020).
- <https://kemenlu.go.id> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2020)
- <https://www.kompasiana.com> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2020).
- <https://m.dw.com> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2020).
- <https://m.liputan6.com/news/read/2968002/5-jejak-isis-dalam-aksi-teror-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2020).
- <https://osf.io> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2020).
- Khairur Rijal, Najamuddin. Januari, 2017. "Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* vol. 13. no. 1, 45-60.
- Livia dan Soenarto. Juli, 2015. "Retorika Barack Hussein Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Menghadapi isu ISIS Di Dunia". *Jurnal Komunikasi* vol. 7. no. 1, 76-77.
- Lucky Andriyani, Novie dan Kushindarti, Feriana. Desember, 2017. "Respons Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik* vol. 14. no. 2, 223-238.
- Mubarak, M. Zaki. Juni, 2015. "DARI NII KE ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer", *Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* vol. 10. no 1, 77-98.
- Oktarina, Dina & Nanda Wardhana, Adhitama. Desember, 2018. "Jihad Melawan Ideologi Radikal ISIS di Indonesia". *JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relations* vol. 1. no. 2, 187-198.
- Sahasrad, Herdi & Al Chaidar. Desember, 2016. "Terorisme Akhir Sejarah Santoso dan Masa Depan Teror di Indonesia". *Jurnal Review Politik* vol. 06. no. 02, 347-366.
- Sanur L, Debora. Maret, 2016. "Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional". *Politica* vol. 7. no. 1, 25-47.

- Tetuko, Bayu & Muryantini, Sri. Mei, 2016. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Isis". *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* vol. 8. no. 2, 1-16.
- Tri Haryanto, Joko. September-Desember, 2015. "Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta)". *Jurnal Multikultural & Multireligius* vol. 14. no. 3, 23-40.